

Dampak Kewarganegaraan terhadap Akses Ekonomi: Analisis atas Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia

The Impact of Citizenship on Economic Access: An Analysis of Socio-Economic Disparities in Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

Email: am.mutsain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Huda

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Muhammad Huda

Ma'had Aly Bina Madani Moga, Indonesia

Email: huda.cerdas157@gmail.com

Zahra Naila Abhista

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: nailalapo13@gmail.com

Selfia

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: selfia.6677@gmail.com

Article Info

Received : 14 November 2024

Revised : 18 November 2024

Accepted : 18 November 2024

Published : 1 February 2024

Keywords: Nationality, Economic Access, Socio-Economic Disparities.

Kata kunci: Kebangsaan, Akses Ekonomi, Kesenjangan Sosial-Ekonomi.

Abstract

Citizenship is a legal status connecting individuals to a country, encompassing rights, obligations, identity, and protection. This study evaluates the impact of citizenship status on economic access and socio-economic inequality in Indonesia, focusing on disparities in well-being and economic opportunities. The research employs a normative legal method with approaches including legislation, case studies, conceptual, historical, and comparative analyses. The results show that citizenship inequality creates significant gaps in income, quality of life, and access to services. Individuals with full citizenship have better access to jobs and education compared to those with limited citizenship or no citizenship. This study recommends more inclusive policy reforms to reduce inequality and improve access for individuals with limited citizenship. The findings aim to assist academics and policymakers in designing strategies to enhance community well-being.

Abstrak

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menghubungkan individu dengan suatu negara, mencakup hak, kewajiban, identitas, dan perlindungan. Penelitian ini mengevaluasi dampak status kewarganegaraan terhadap akses ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada perbedaan kesejahteraan dan peluang ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kewarganegaraan menciptakan kesenjangan signifikan dalam pendapatan, kualitas hidup, dan akses layanan. Individu dengan kewarganegaraan penuh memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan dan pendidikan dibandingkan yang memiliki kewarganegaraan terbatas atau tanpa kewarganegaraan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan akses bagi individu dengan kewarganegaraan terbatas. Temuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan merancang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Huda, Muhammad Huda, Zahra Naila Abhista, Selfia. "Dampak Kewarganegaraan terhadap Akses Ekonomi: Analisis atas Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 1-12. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Huda, Muhammad Huda, Zahra Naila Abhista, Selfia



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu dalam sebuah negara, termasuk hak untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber daya sosial dan ekonomi. Selain itu, Arendt mengemukakan bahwa kewarganegaraan bukan hanya tentang hak yang dimiliki seseorang di dalam suatu negara, tetapi juga tentang pengakuan sebagai anggota komunitas politik. Ia mengkritik bagaimana pengasingan dan perpecahan politik dapat menghilangkan hak-hak dasar seseorang. Di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman etnis dan budaya, status kewarganegaraan memiliki dampak signifikan terhadap akses individu ke peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Konteks ini penting untuk dianalisis mengingat ketidakmerataan akses yang seringkali berhubungan langsung dengan status kewarganegaraan seseorang.

Kewarganegaraan mempengaruhi sejauh mana individu dapat berpartisipasi dalam pasar kerja, memperoleh pendidikan yang layak, dan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kewarganegaraan penuh cenderung memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki kewarganegaraan terbatas atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat (Aji & Sari, 2023; Haris & Wijaya, 2022).

Di Indonesia, masalah ketidaksetaraan kewarganegaraan tidak hanya terjadi pada mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi juga pada mereka yang memiliki status kewarganegaraan terbatas. Misalnya, individu dengan kewarganegaraan terbatas sering kali menghadapi diskriminasi dalam akses pekerjaan dan pendidikan, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Hal ini diperparah dengan adanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti warga negara asing yang tinggal secara permanen di Indonesia tanpa memiliki status kewarganegaraan resmi (Kusuma & Jaya, 2021).

Secara historis, kebijakan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami perubahan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Reformasi kebijakan pada awal tahun 2000-an telah membawa perubahan signifikan, tetapi masalah ketidaksetaraan tetap ada, terutama dalam konteks kewarganegaraan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbedaan dalam kewarganegaraan sering kali mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses ekonomi, yang menciptakan perbedaan yang mencolok dalam pendapatan dan kualitas hidup (Mahmud & Rahman, 2021).

Ketidaksetaraan dalam akses ekonomi dapat dilihat dalam berbagai indikator, termasuk tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar. Data menunjukkan bahwa individu dengan kewarganegaraan penuh umumnya memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang layak dan pendidikan berkualitas. Sebaliknya, mereka dengan kewarganegaraan terbatas atau tanpa kewarganegaraan sering kali terjebak dalam pekerjaan informal atau berpendapatan rendah dan memiliki akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan (Prabowo & Wulandari, 2022; Sari & Wibowo, 2022).

Studi mengenai dampak kewarganegaraan terhadap akses ekonomi menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan migrasi internasional yang mempengaruhi komposisi demografis di berbagai negara. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi tantangan tambahan terkait dengan keberagaman populasi dan dinamika migrasi yang mempengaruhi status kewarganegaraan dan akses ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi akses ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif (Yulianto & Andini, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kewarganegaraan terhadap akses ekonomi di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kewarganegaraan dan akses individu terhadap peluang ekonomi, serta mengevaluasi dampak ketidaksetaraan kewarganegaraan terhadap kesenjangan sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari survei nasional serta wawancara dengan pakar sosial-ekonomi dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akses ekonomi dan bagaimana ketidaksetaraan kewarganegaraan berkontribusi pada kesenjangan sosial-ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab masalah. Karakteristik penelitian adalah preskriptif dan metode yang digunakan adalah penelitian normatif, doktrinal, dan kepustakaan. Penelitian normatif kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, dan majalah. Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penulisan ini:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan, menurut Hamzah. Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang sejenis, bukan berdasarkan persepsi peneliti sendiri. Penelitian kualitatif atau qualitative juga termasuk kepustakaan. Menurut Moleong, ia menggunakan sumber literatur. Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menyatakan bahwa penulis berkonsentrasi pada penelitian buku atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lainnya yang terkait dengan subjek yang dibahas. Setelah itu, peneliti membaca, membedakan, dan menganalisis teks materi untuk mendapatkan informasi konseptual dan teoritis serta bukti dari sumber sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang penting dalam menentukan hak dan kewajiban individu dalam suatu negara. Di Indonesia, perbedaan status kewarganegaraan dapat mempengaruhi akses individu terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan layanan publik. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masih ada ketimpangan yang mencolok antara berbagai kelompok berdasarkan status kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak kewarganegaraan terhadap akses ekonomi dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia.

3.1. Kewarganegaraan dan Akses Ekonomi

- a. Kewarganegaraan dan Hak Ekonomi

Kewarganegaraan menentukan akses individu terhadap hak-hak ekonomi yang mencakup pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Warga negara penuh di Indonesia umumnya memiliki hak akses yang lebih baik dibandingkan penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan. Menurut penelitian oleh Hadi dan Rakhman (2021), perbedaan dalam hak-hak ini sering kali menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan peluang kerja. Sama halnya yang dikemukakan oleh Barker, berkaitan dengan mengeksplorasi berbagai aspek dari ketidaksetaraan ekonomi yang disebabkan oleh perbedaan status kewarganegaraan, termasuk akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Ia menekankan bahwa kewarganegaraan berfungsi sebagai mekanisme kunci dalam distribusi sumber daya ekonomi dan menciptakan kesenjangan antara warga negara dan non-warga negara. Barker juga membahas perbedaan dalam perlindungan sosial yang diberikan kepada warga negara dibandingkan dengan imigran dan pengungsi.

b. Kewarganegaraan dengan Teknologi Digital

Peterson dan Lee (2022) mengkaji bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi akses ke teknologi digital dan peluang ekonomi di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa warga negara sering kali memiliki akses yang lebih baik ke infrastruktur digital dan platform e-commerce dibandingkan dengan non-warga negara atau imigran. Hal ini menciptakan kesenjangan digital yang memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Artikel ini merekomendasikan kebijakan inklusif untuk meningkatkan akses teknologi bagi semua individu, terlepas dari status kewarganegaraan, dan investasi dalam infrastruktur digital di negara-negara berkembang untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

c. Pengaruh Status Kewarganegaraan terhadap Pekerjaan

Warga negara Indonesia memiliki keunggulan dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal, sementara penduduk asing dengan izin tinggal sering kali hanya memiliki akses terbatas pada pekerjaan di sektor tertentu dan sering menghadapi batasan hukum (Fauzi & Sulaiman, 2022). Hal ini diperparah dengan fakta bahwa individu tanpa kewarganegaraan sering kali terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah yang lebih rendah dan tanpa perlindungan sosial (Jamilah et al., 2021). Selain itu Kumar dan Sharma (2022) juga menganalisis dampak status kewarganegaraan terhadap ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia. Penelitiannya menemukan bahwa non-warga negara menghadapi kendala signifikan dalam mengakses pekerjaan, upah, dan program sosial dibandingkan dengan warga negara, yang memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

d. Pendidikan dan Kewarganegaraan

Akses pendidikan yang berkualitas sering kali lebih mudah diakses oleh warga negara dibandingkan penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan. Kusuma dan Jaya (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan bagi penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan dapat menghambat peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini mempengaruhi pada

pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu sosial dan ekonomi, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam mencari solusi terhadap ketimpangan yang ada dan berperan serta dalam upaya-upaya sosial dan ekonomi.

e. Layanan Kesehatan dan Sosial

Layanan kesehatan dan sosial juga sangat bergantung pada status kewarganegaraan. Warga negara biasanya mendapatkan akses penuh terhadap fasilitas kesehatan dan program sosial, sementara penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai (Lubis & Suryani, 2021). Ini juga dikemukakan oleh Singh dan Kumar (2022) mengkaji dampak status kewarganegaraan terhadap akses layanan publik di negara-negara berkembang. Mereka menemukan bahwa warga negara biasanya memiliki akses yang lebih baik dan lebih luas ke layanan seperti kesehatan dan pendidikan dibandingkan dengan non-warga negara. Ketidaksetaraan ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dengan non-warga negara sering kali mengalami kualitas layanan yang lebih rendah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif, peningkatan alokasi sumber daya, dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan memperbaiki akses layanan bagi semua penduduk. Pembahasan Subbab 1 (Dirgantoro, 2018; Iskandar, 2020; Prawiyogi, Purwanugraha, Fakhry, & Firmansyah, 2020)

3.2. Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia

a. Ketimpangan Ekonomi berdasarkan Status Kewarganegaraan

Ketimpangan ekonomi di Indonesia sering kali terhubung dengan perbedaan dalam status kewarganegaraan. Haris dan Wijaya (2022) menemukan bahwa penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi yang setara dengan warga negara. Ini termasuk akses ke pasar tenaga kerja yang lebih baik, serta sumber daya dan dukungan pemerintah.

b. Kesenjangan Pendapatan

Penelitian oleh Dewi dan Susanti (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara warga negara dan penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan sangat signifikan. Kewarganegaraan memberikan hak-hak yang secara langsung mempengaruhi pendapatan, seperti akses ke pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi dan perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Sementara itu, penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan sering kali terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan tanpa hak-hak yang memadai.

c. Keterbatasan Akses terhadap Program Sosial

Warga negara memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai program sosial yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Mahmud dan Rahman (2021), program-program seperti bantuan sosial, subsidi, dan tunjangan kesehatan umumnya dirancang untuk warga negara dan sering kali tidak mencakup penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan. Ini berkontribusi pada perbedaan dalam kualitas hidup dan ketahanan ekonomi antara kelompok-kelompok tersebut. Pembahasan Subbab 1 (Dirgantoro, 2018; Iskandar, 2020; Prawiyogi, Purwanugraha, Fakhry, & Firmansyah, 2020)

3.3. Studi Kasus: Kewarganegaraan dan Akses Ekonomi di Berbagai Region di Indonesia

a. Kasus Jakarta

Di Jakarta, perbedaan akses ekonomi antara warga negara dan penduduk asing sangat mencolok. Penduduk asing sering kali terlibat dalam sektor-sektor tertentu seperti teknologi dan bisnis internasional, namun mereka sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas umum dan dukungan sosial (Nugroho & Setiawan, 2023). Penelitian oleh Sari dan Wibowo (2022) menunjukkan bahwa meskipun penduduk asing berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Jakarta, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang setara dengan warga negara.

b. Kasus Daerah Terpencil terhadap Pekerjaan

Di daerah-daerah terpencil, kesenjangan sosial-ekonomi antara warga negara dan individu tanpa kewarganegaraan lebih terasa. Individu tanpa kewarganegaraan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan akses ke layanan sosial dasar. Sutrisno et al. (2022) mencatat bahwa di beberapa daerah, individu tanpa kewarganegaraan bekerja di sektor-sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk dan upah rendah, yang memperburuk ketimpangan ekonomi.

c. Kasus Kalimantan dan Sumatra

Kesenjangan pendapatan antara wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan dan Sumatra dengan wilayah lain di Indonesia menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan. Meskipun daerah-daerah ini kaya akan sumber daya seperti batu bara, minyak, dan gas, serta memiliki potensi ekonomi yang besar, pendapatan rata-rata masyarakat lokal tidak meningkat secara sebanding dengan kekayaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan dalam distribusi keuntungan dari industri ekstraktif dan dampak negatif yang sering mengikutinya. Keuntungan dari industri ini cenderung mengalir ke pusat-pusat ekonomi besar dan perusahaan besar, sementara masyarakat lokal seringkali tidak mendapatkan manfaat langsung yang signifikan. Dampak lingkungan dari aktivitas ekstraktif, seperti deforestasi dan pencemaran, juga berkontribusi pada menurunnya kualitas hidup di daerah penghasil. Akibatnya,

kesenjangan pendapatan antara pemilik modal dan pekerja lokal semakin melebar (Wulandari, 2017; BPS, 2021).

d. Kasus Pendidikan di Papua

Pendidikan di Papua, termasuk pendidikan kewarganegaraan, sering kali tidak memadai. Banyak daerah terpencil kekurangan fasilitas pendidikan yang layak dan tenaga pengajar yang berkualitas. Kurangnya pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Hal ini mengakibatkan partisipasi yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Pendidikan yang tidak merata memperburuk kesenjangan sosial. Masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak terlibat dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka.

3.4. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh perbedaan kewarganegaraan. Misalnya, ada kebijakan untuk memberikan bantuan sosial yang lebih inklusif. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan dalam menjangkau semua kelompok yang membutuhkan, termasuk penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan (Yulianto & Andini, 2023). Pembahasan Subbab 1 (Dirgantoro, 2018; Iskandar, 2020; Prawiyogi, Purwanugraha, Fakhry, & Firmansyah, 2020)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan dampak signifikan dari status kewarganegaraan terhadap akses ekonomi di Indonesia, yang secara langsung mempengaruhi kesenjangan sosial-ekonomi di negara tersebut. Berdasarkan analisis, terdapat perbedaan mencolok dalam peluang ekonomi, pendapatan, dan akses terhadap layanan sosial antara warga negara Indonesia, penduduk asing, dan individu tanpa kewarganegaraan.

1. Dampak Kewarganegaraan terhadap Akses Ekonomi

Kewarganegaraan memiliki dampak yang besar terhadap akses ekonomi. Warga negara Indonesia umumnya memiliki hak akses yang lebih luas terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial dibandingkan penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan. Warga negara memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan menikmati perlindungan hukum yang memadai. Sebaliknya, penduduk asing sering kali terjebak dalam pekerjaan dengan batasan hukum dan pendapatan yang lebih rendah, sedangkan individu tanpa kewarganegaraan sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial.

2. Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Kesenjangan sosial-ekonomi yang terlihat jelas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan berdasarkan status kewarganegaraan

memperburuk distribusi pendapatan dan akses terhadap berbagai sumber daya. Penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan menghadapi hambatan yang signifikan dalam memperoleh pendapatan yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta layanan kesehatan dan sosial. Hal ini menciptakan jurang yang lebar antara kelompok-kelompok ini dan warga negara, memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.

3. Kebijakan dan Rekomendasi

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk menangani ketimpangan ini, tetapi tantangan besar masih ada. Untuk mengatasi kesenjangan yang ada, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif. Rekomendasi termasuk peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan, perlindungan hak kerja yang lebih baik, serta penyediaan layanan kesehatan dan sosial yang lebih inklusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memberikan peluang yang lebih adil bagi semua individu di Indonesia.

4. Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah tambahan yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan. Studi longitudinal yang mengikuti perubahan dalam status kewarganegaraan dan dampaknya terhadap akses ekonomi akan sangat berharga. Selain itu, penelitian di berbagai daerah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dampak kewarganegaraan di seluruh Indonesia.

5. Secara keseluruhan, dampak kewarganegaraan terhadap akses ekonomi di Indonesia adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan dan peneliti untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran untuk mengatasi dampak kewarganegaraan terhadap akses ekonomi di Indonesia:

1. Kebijakan Kewarganegaraan: Perluasan hak ekonomi bagi penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan melalui reformasi kebijakan agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial.
2. Penyediaan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang inklusif untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan.
3. Perlindungan Hak Kerja: Memperkuat penegakan hukum terkait hak-hak kerja untuk memastikan perlindungan yang adil di tempat kerja bagi semua individu, tanpa memandang status kewarganegaraan.

4. Akses ke Layanan Kesehatan dan Sosial: Menjamin akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan sosial bagi penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan.
5. Pengembangan Data dan Penelitian: Melakukan studi mendalam dan mengumpulkan data terbaru untuk memahami dampak kewarganegaraan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
6. Kampanye Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusi sosial dan ekonomi bagi semua individu, terlepas dari status kewarganegaraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Aji, A. B., & Sari, R. (2023). Economic Inequality and Citizenship Status: A Study on Access to Economic Opportunities in Indonesia. *Journal of Indonesian Economics*, 15(2), 112-130.
- Arendt, Hannah. (2020). *The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity, and International Law*. Edisi baru, 50-70.
- Barker, T. (2023). "Citizenship and Economic Inequality: An Analysis of Access to Economic Resources." *Journal of Social Policy*, 52(3), 450-468.
- Dewi, R. P., & Susanti, I. (2022). Citizenship and Access to Public Services in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Policy*, 18(1), 45-63.
- Fauzi, A., & Sulaiman, R. (2022). Socioeconomic Impact of Citizenship Status on Access to Economic Opportunities in Indonesia. *Journal of Indonesian Development Studies*, 14(2), 115-130.
- Hadi, M., & Rakhman, I. (2021). Income Disparity and Citizenship: Empirical Evidence from Indonesia. *Economic Review Journal*, 13(3), 45-60.
- Haris, S., & Wijaya, T. (2022). The Impact of Citizenship Status on Employment Opportunities in Indonesia. *Asian Journal of Labour Economics*, 11(3), 78-94.

- Hidayati, N. (2019). "Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Sosial Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan dan Sosial*, 12(1), 85-99.
- hmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Jamilah, N., Anggraini, T., & Yuliana, S. (2021). Analysis of Economic Access and Citizenship Status: Evidence from Indonesian Data. *Indonesian Journal of Economics and Business*, 19(4), 203-220.
- Kumar, R., & Sharma, S. (2022). "Citizenship Status and Economic Disparities in Developing Countries: A Case Study of Indonesia." *Development Studies Research*, 9(2), 123-136.
- Kusuma, H., & Jaya, S. (2021). Educational Disparities and Citizenship: An Empirical Analysis of Indonesian Data. *Journal of Education and Development*, 12(4), 203-219.
- Lubis, R., & Suryani, L. (2021). Healthcare Access and Citizenship: Evaluating Inequality in Indonesia. *Health Policy Review*, 14(2), 56-72.
- Mahmud, R., & Rahman, A. (2021). Social Protection and Citizenship Status: A Case Study of Indonesia. *Social Protection Journal*, 9(2), 88-102.
- Maulana, Y. (2020). "Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Papua: Pengaruh Pendidikan terhadap Akses Ekonomi." *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 13(2), 75-90.
- Nugroho, B., & Setiawan, A. (2023). Economic Access and Citizenship in Urban Indonesia: A Comparative Study. *Urban Studies Journal*, 16(1), 23-40.
- Peterson, M., & Lee, H. (2022). "Economic Access and Citizenship in the Digital Age." *Journal of Digital Economics*, 4(2), 58-74.
- Prabowo, J., & Wulandari, E. (2022). Inequality and Legal Status: Implications for Economic Participation in Indonesia. *Law and Society Review*, 20(3), 234-251.
- Riyadi, A., Ismail, F., & Aminah, L. (2023). Validating Survey Instruments for Social Research: Evidence from Indonesia. *Indonesian Journal of Social Research*, 20(1), 35-50.
- Sari, M., & Wibowo, H. (2022). Access to Social Services and Citizenship: Insights from Indonesia. *Journal of Social Policy and Administration*, 13(4), 159-175.
- Singh, R., & Kumar, P. (2022). "Inequality and Citizenship: Access to Public Services in Emerging Economies." *Public Administration Review*, 82(3), 367-380.
- Wulandari, S. (2017). "Kesenjangan Pendapatan di Wilayah Penghasil Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kalimantan dan Sumatra." *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(3), 35-50.
- Yulianto, B., & Andini, D. (2023). The Role of Citizenship in Shaping Economic Opportunities: Evidence from Indonesia. *Development Economics Review*, 17(1), 95-112.
- Dirgantoro, K. P. S. (2018). Kompetensi guru matematika dalam

- mengembangkan kompetensi matematis siswa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 8(2), 157–166.
- Iskandar, A. dan A. S. (2020). Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh di Masa Pandemi: Studi Kasus Balai Diklat Keuangan Makassar. *Jurnal PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 4, No. 6(Pembelajaran daring), 1206–1221. doi: <http://dx.doi.org/10.33578/pjr.v4i6.8131>
- Mulyadi, S., Basuki, A. M. H., & Prabowo, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. I). Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prawiyogi, A. G., Purwanugraha, A., Fakhry, G., & Firmansyah, M. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pembelajaran Siswa di SDIT Cendekia Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(1), 94–101.
- Subekan, A., & Iskandar, A. (2019). Pengaruh Pemahaman Nilai Dasar “ANEKA” Terhadap Pembentukan Sikap Peserta Latsar CPNS Pada Balai Diklat Keuangan Malang. *Jurnal Pendidikan*, 20, No. 2(Pelatihan Dasar PNS), 91–110.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Retrieved from <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.